



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI JAMBI**

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas memiliki 2 (dua) Indikator yaitu :
 - a. Persentase Koperasi Berkualitas. Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2022 adalah sebesar 7,34 %.
 - b. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2022 adalah sebesar minus 0,64%%.
2. **Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi Secara Optimal pada Peningkatan PDRB memiliki 4 (empat) Indikator yaitu :**
 - a. Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2022 adalah sebesar 91,61 %.
 - b. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM Binaan Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2022 adalah sebesar minus 9684,4 %.
 - c. Persentase Pertumbuhan Aset UMKM Binaan Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2022 adalah sebesar minus 1529,7 %.
 - d. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2022 adalah sebesar minus 1529,7 %.
 - e. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2022 adalah sebesar minus 21,9 %.
3. Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik **memiliki 2 (dua) Indikator yaitu**
 - a. Nilai SAKIP
 - b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi pada tahun 2022 adalah sebesar 88,9 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 yang merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Disamping itu juga mempedomani pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor.PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja organisasinya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan menuju terwujudnya Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Jambi, Januari 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAMBI**



HAMDAN, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19630421 198503 1 008

Daftar Isi

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	10
A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	11
B. Aspek Strategis Organisasi.....	12
C. Struktur Organisasi	14
D. Isu Strategis (Permasalahan Utama) Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi.....	20
E. Sistematika Penyajian.....	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	33
A. RPJMD 2021-2026.....	34
B. Rencana Strategis	37
C. Sasaran	38
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	42
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	54
Lampiran	
1. Matriks Renstra (Program Kegiatan 2016-2021)	
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	
3. Matriks Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020	
4. Matriks Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	
5. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2020	
6. Matriks Rencana Kinerja (Renja) Tahunan 2022	
7. Matriks Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	

BAB I

P E N D A H U L U A N

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

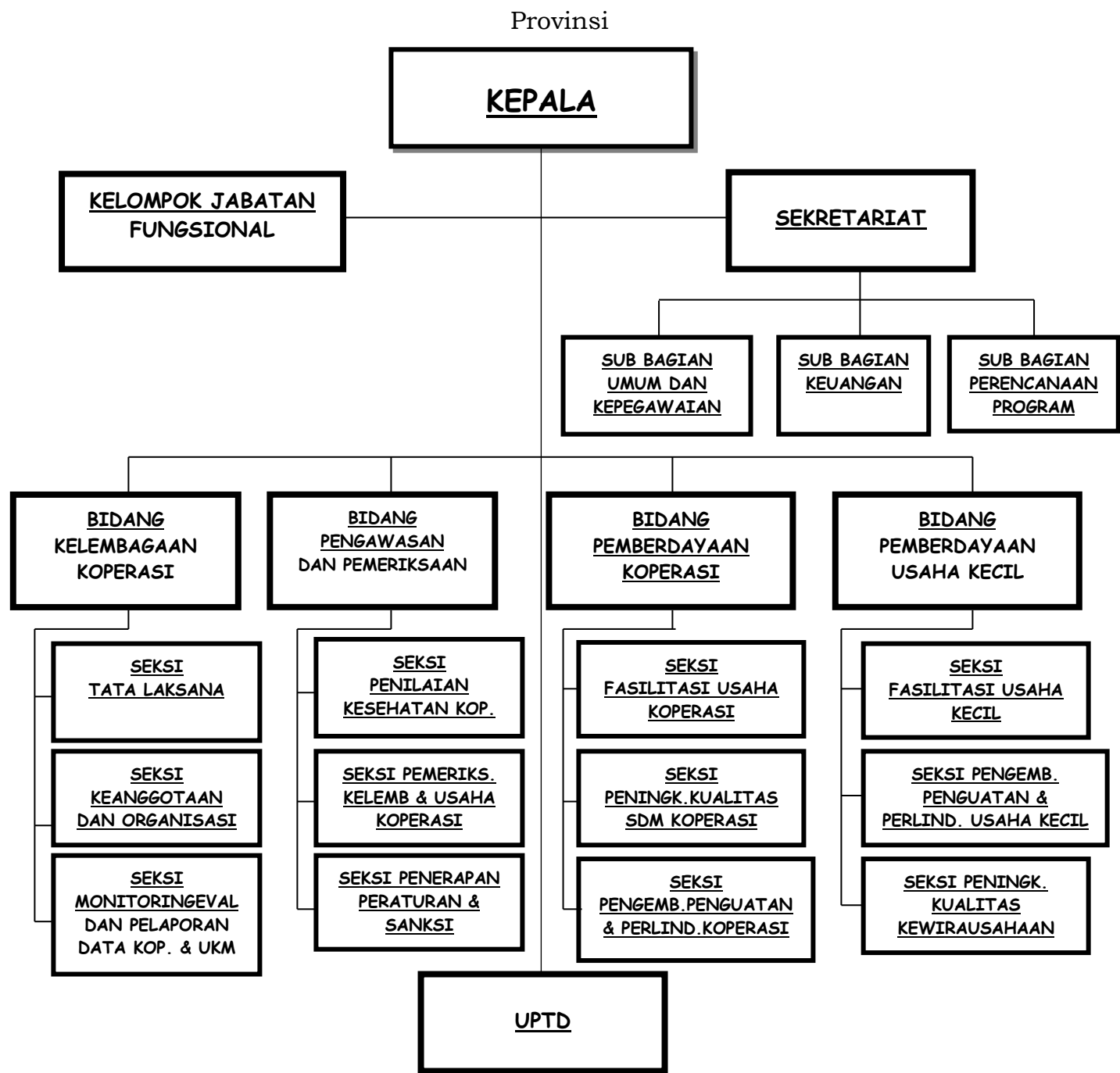
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi
2. Mendorong Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Provinsi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lemnbaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 8). Kemudian diperbarui dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi



1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan

perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- i. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. Melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
- m. Pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- n. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas fungsi di atas, Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1. Sekretariat**, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencana operasional kegiatan lingkup dinas;
- b. Pengkoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
- c. Pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
- d. Pengkoordinasian tugas bidang – bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
- e. Pengelolaan urusan umum, dan kepegawaian, program serta keuangan dan aset;

- f. Pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yakni (1). Sub Bagian Program; (2). Sub Bagian Keuangan (3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. **Bidang Kelembagaan Koperasi**, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang kelembagaan koperasi, dan memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- c. Pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup;
- d. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- g. Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

- i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Kelembagaan dan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : Seksi tata laksana, Seksi keanggotaan dan organisasi, Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi dan usaha kecil menengah.

- 3. ***Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan***, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- c. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. Pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. Pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;

- g. Pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- h. Pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi penilaian kesehatan koperasi, seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi dan seksi penerapan peraturan dan sanksi

4. **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- c. Pengaturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- d. Pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- f. Pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;

- g. Pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- i. Pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- l. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha koperasi, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi dan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5. ***Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil***, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemberdayaan usaha kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;

- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (iumk);
- f. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- h. Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha kecil, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan usaha kecil dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan.

6. UPTD

Dalam hal melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, dalam hal ini UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai dengan keahlian masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Koperasi sesuai dengan watak sosialnya adalah wahana yang tepat untuk pembangunan yang berkeadilan. Koperasi sebagai gerakan lapisan masyarakat terbawah (*grassroots*), apabila lebih

banyak dilibatkan dalam pembangunan, akan dapat menghasilkan pembangunan yang lebih merata, pembangunan yang tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan rakyat. Sebagai wadah ekonomi rakyat koperasi mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, solidaritas, otonom, partisipatif dan berwatak sosial dan dengan demikian merupakan organisasi ekonomi yang mencerminkan peran serta rakyat yang luas.

Mengingat sangat mendasar dan sangat prinsipilnya masalah koperasi bagi kehidupan bangsa Indonesia untuk tidak ditangani secara sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan ketetapan hati maka pemerintah perlu menggalang koperasi agar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan mampu memberi jalan bagi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, dengan membangun institusi pusat yang mengatur regulasi dan pendanaan melalui Kementerian Koperasi dan UKM, yang selanjutnya didesentralisasikan pula tugas-tugas dimaksud melalui organisasi dan kelembagaan pada tingkat Provinsi yang dibentuk melalui peraturan perundangan sesuai dengan kewenangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi berfungsi mengimplementasikan program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, maka posisi dan keberadaannya menjadi sangat strategis terutama karena perannya sebagai:

- Dinamisor
- Regulator dan
- Fasilitator dalam pengembangan KUKM.
- Dinas Pendukung Instansi Teknis

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya kelembagaan Koperasi dalam melaksanakan prinsip dan jatidiri Koperasi;
2. Penyelenggaraan RAT Koperasi Masih Minim

A. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tertanggal 29 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diberikan tugas untuk Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelayanan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai suatu instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja, dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini adalah bentuk formal dari pada laporan pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah yang memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran dari pelaksanaan suatu rencana kerja yang telah ditetapkan.

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi bermanfaat untuk :

- Mendorong agar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai suatu instansi pemerintah melaksanakan Good Government, karena Laporan Kinerja mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mewujudkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stake Holders) dengan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi sebagai instansi pemerintah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian diatas maka secara konkrit Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj), khususnya selama Tahun Anggaran 2022.

B. Aspek Strategis Organisasi.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, disamping RPJMN, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini merupakan tahapan keempat dari RPJPD Provinsi Jambi. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk Tahun 2021-2026, yaitu:

**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT”**

JAMBI MANTAP 2024

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan, yaitu

Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta birokrasi yang kapebel dengan pelayanan publik yang prima.

2. Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah,

yaitu memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan, meningkatkan industri pengolahan, meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata, memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar, meningkatnya kualitas lingkungan, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.

3. Memantapkan kualitas sumber daya manusia, yaitu

meningkat kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, meningkatnya akses pendidikan, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya, meningkatnya toleransi intra dan antar agama, dan meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan.

Misi yang terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM adalah misi kedua yaitu memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah dengan tujuan untuk memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tepatnya pada sasaran

meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata. Selain itu Dinas Koperasi, UKM juga mendukung keseluruhan misi lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan di sektor terkait.

C. Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi merupakan salah satu Dinas/Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Provinsi Jambi di bidang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai suatu Dinas/Instansi yang bertanggung jawab langsung pada Gubernur Jambi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Keuangan dan Asset.
 3. Subbagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Tata Laksana.
 2. Seksi Keanggotaan dan Organisasi.
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Data Koperasi & Usaha Kecil Menengah.
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari :
 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi.
 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
 3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.

3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil terdiri dari :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil.
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.
 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dapat dilihat pada diagram berikut:

Seluruh Subbag/Seksi/Bagian/Bidang di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pergub Nomor 48 Tahun 2016
- b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- c. perencanaan operasional kegiatan lingkup dinas;
- d. pengoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
- e. pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
- f. pengkoordinasian tugas bidang-bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, ketatausahaan koperasi usaha kecil dan menengah;
- g. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, program, serta keuangan dan aset;

- h. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kelembagaan Koperasi.

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang kelembagaan koperasi dan memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar. Bidang Perizinan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
- a. Pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
- a. Pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup;
- b. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- c. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- d. Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- e. Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- g. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- b. perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- a. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- b. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- e. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- f. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- h. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- c. perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;
- a. pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;
- b. peraturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

- c. pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- e. pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;
- f. pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
- h. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- i. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
- j. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- k. pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang pemberdayaan usaha kecil mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- e. Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);

- f. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
- g. Pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala kecil menjadi usaha menengah;
- h. Pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Secara umum, jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2022 mencapai 59 orang, dengan rincian 28 orang berjenis kelamin laki-laki dan 31 orang perempuan.

Tabel 1.1
STRUKTUR SDM DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI JAMBI

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS
1	Menurut Jenis Kelamin	Laki – laki	28
		Perempuan	31
2	Menurut Pendidikan	S3	1
		S2	13
		S1	36
		Sarjana Muda	4
		SLTA	5
		SLTP	-
		SD	-
3	Menurut Agama	Islam	59
		Kristen	-

Jika dilihat tabel diatas maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana dengan rincian yaitu Pendidikan Strata 3 (S3) yaitu sebanyak 1,6 persen, Pendidikan Strata 2 (S2) yaitu sebanyak 22,03 persen, Pendidikan Strata 1 (S1) yaitu sebanyak 61,01 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, sedangkan yang

berpendidikan terakhir Sarjana Muda (D3) dan SLTA masing-masing sebesar 6,78 persen dan 8,48 persen

Tabel 1.2
STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON,
PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	Menurut Eselon	Eselon II.a	1
		Eselon III.a	5
		Eselon IV.a	15
2	Pejabat Fungsional	Pengawas	4
3	Menurut Golongan	Golongan I	-
		Golongan II	5
		Golongan III	37
		Golongan IV	17

D. Isu Strategis (Permasalahan Utama) Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM di Provinsi Jambi dimuat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Permasalahan Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

No	Kategori Binaan	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas koperasi	Rendahnya kapasitas SDM koperasi	Rendahnya kualitas SDM koperasi dalam mengakses ICT jaringan pemasaran
			Terbatasnya SDM aparatur pembina koperasi yang kompeten
			Masih banyaknya anggota koperasi yang tidak paham koperasi
			Masih rendahnya minat kaum milenial terhadap koperasi
		Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi	Masih banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT
			Masih banyak koperasi yang tidak aktif

			Masih banyak koperasi yang belum memiliki legalitas
			Kurangnya pemahaman pengurus koperasi terhadap aturan kelembagaan dan usaha koperasi
		Akses pembiayaan koperasi	Akses pembiayaan masih terbatas dan masih tergantung pada pemerintah
		Akses kemitraan koperasi	Akses kemitraan masih terbatas dan perlu pendampingan
2	Belum optimalnya daya saing UMKM	Rendahnya pemasaran produk UMKM	Belum optimalnya pemanfaatan ICT dalam pemasaran produk UKM
			Rendahnya manajemen pemasaran
			Terbatasnya jejaring pemasaran
			Belum optimalnya branding dan kemasan produk UKM
		Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi oleh UKM	Rendahnya SDM UMKM dalam pemanfaatan teknologi
		Rendahnya produktivitas UKM	Kualitas produksi UKM rendah
			Diversifikasi produk UKM rendah
			Manajemen produksi masih rendah
		Akses pembiayaan UKM	Akses pembiayaan masih terbatas dan tergantung pada bantuan pemerintahan yang bersifat program kredit tanpa angsuran
		Masih rendahnya manajemen pengelolaan UKM	Rendahnya kapasitas SDM UKM
			Masih rendahnya legalitas UKM

Dari paparan permasalahan koperasi dan UKM diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa permasalahan utama koperasi dan

UKM terletak pada aspek rendahnya kapasitas SDM, kelembagaan, permodalan/pembiayaan, pemanfaatan teknologi belum optimal, kemitraaan .

E. Sistematika Penyajian.

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:

BAB I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

BAB II - Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2022.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- B.** Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV - Penutup, Mengemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi memfokuskan pencapaian sasaran utama di tahun 2022 pada :

1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB
3. Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik

Dalam mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui beberapa strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Honorer Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tupoksi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi
2. Meningkatkan kapasitas pengurus dan manajer koperasi
3. Meningkatkan kapasitas,jangkauan dan inovasi untuk berkoperasi
4. Memanfaatkan digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan Memfasilitasi akses perbankan bagi UMKM
5. Memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi
6. Memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM (Program Dumisake)
7. Memanfaatkan Kawasan wisata sebagai tempat pemasaran/pameran produk UMKM dengan melibatkan kabupaten/Kota

Sasaran tersebut diprioritaskan dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Adapun tujuan Dinas Koperasi, UKM

Provinsi Jambi adalah” ***Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing***”. Melalui upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan dan perkembangan usaha koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi agar semakin maju dan berkembang serta berdaya saing sehingga masyarakat koperasi dan UMKM semakin sejahtera. Serta “***Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik.***”. Menuju organisasi pemerintah yang berkualitas dalam pelayanan dan kinerja organisasi yang akuntabel sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tingkat kepuasan masyarakat yang baik.

Dimana untuk mencapai sasaran dimaksud maka di tahun 2022 telah ditetapkan 8 (delapan) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2021-2026
2. Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi 2021-2026
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

A. RPJMD 2021-2026

Visi daerah Provinsi Jambi yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi adalah “***Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT***”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e- government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Jambi tersebut, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Jambi selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi lebih dititikberatkan pada pencapaian misi ke 2 (dua) Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yaitu ” **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**”

Berdasarkan rumusan visi dan misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis
4. Mewujudkan ketertiban umum daerah
5. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN
6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan
7. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Berdasarkan tujuan, maka sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata

6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat lingkungan
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya akses pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan

B. Rencana Strategis

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
- 2 Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berangkat dari Tujuan Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Koperasi, UKM Provinsi

Jambi mendukung pencapaian tujuan kedua yaitu Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah” ***Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing***”. Melalui upaya pemberdayaan koperasi dan UKM dengan berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan dan perkembangan usaha koperasi dan UMKM di Provinsi Jambi agar semakin maju dan berkembang serta berdaya saing sehingga masyarakat koperasi dan UMKM semakin sejahtera.

Selain daripada itu tujuan Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi adalah “***Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik.***”. Menuju organisasi pemerintah yang berkualitas dalam pelayanan dan kinerja organisasi yang akuntabel sehingga terwujud tata pemerintahan yang baik (good governance), kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal dan tingkat kepuasan masyarakat yang baik.

C. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara riil oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih khusus dan terukur. Untuk itu, sasaran harus dibuat dengan jelas dan dapat diukur. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022, dijabarkan pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2022
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	5,4%
	Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha	3,38%
2	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Nilai SAKIP	71 (BB)
		Nilai Kepuasan Masyarakat	86

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi serta RPJMD Tahun 2021-2026. Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi tahun 2022.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	5,4%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	0.03%
	Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha	3,38%
		Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan	0,07%
		Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan	29%
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector UMKM	0,57%
2	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Nilai SAKIP	71 (BB)
		Nilai Kepuasan Masyarakat	86

Program	Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 11,484,582,188,-
2 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 125,000,000,-
3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 300,000,000,-
4 Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi (1 Kegiatan)	Rp. 210,000,000,-
5 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 2,718,155,947,-
6 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 704,999,930,-
7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Rp. 21,166,930,860,-
8 Program Pengembangan UMKM	Rp. 349,999,620,-
T O T A L	37,059,668,545,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempenangjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi dengan Kepala Daerah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja program berupa masukan, keluaran, dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.
3. Akuntabilitas Keuangan.

Tabel 3.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

	RENTANG CAPAIAN	Kategori Capaian
	Lebih dari 100 %	Sangat baik
	76 % sampai 100 %	Baik Cukup Kurang
	56 % sampai 75 %	Cukup Kurang
	Kurang dari 55 %	Cukup Kurang

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	% CAPAIAN 2021	2022			% CAPAIAN TARGET RENSTRA
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(*)
1	Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	12,35%	5,4%	7,34%	135,93%	6,7%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi	(11,19%)	0.03%	(0,64%)	(213,33%)	2,23%
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha	4,93%	3,38%	91,61%	2710,35%	14%
		Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan	9,23%	0,07%	(9684,4%)	(138.348,57%)	0,09%
		Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan	43,3%	29%	(1,529,7%)	(5274,83%)	35%
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector UMKM	170,24%	0,57%	21,9%	3842,11%	10%
3	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	Nilai SAKIP	69,73	71 (BB)			81 (A)

		Nilai Kepuasan Masyarakat		86	88,9	103,37%	88
--	--	---------------------------	--	----	------	---------	----

Dimana Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi memiliki 3 (tiga) Sasaran strategis dengan 8 (delapan) target kinerja diantaranya Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dengan indikator Persentase Koperasi Berkualitas dan Pertumbuhan volume usaha koperasi, Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB dengan indikator kinerja Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha, Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan, Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan, Persentase pertumbuhan tenaga kerja sector UMKM dan Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dan Nilai Kepuasan Masyarakat.

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya.

Sedangkan tingkat produktivitas koperasi memberikan gambaran seberapa besar tingkat hasil kegiatan koperasi dengan modal kerja yang ada. Untuk dapat melihatnya diperlukan analisis laporan koperasi. Analisis laporan ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus. Laporan ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi produktivitas koperasi.

Upaya peningkatan produktivitas membutuhkan beberapa indikator sebagai evaluasi. Indikator tersebut diantaranya dilihat dari aspek kelembagaan, usaha koperasi, pelayanan, partisipasi anggota dan jaringan kerja. Hasil dari evaluasi ini maka dapat ditentukan system kebijakan jangka pendek dan jangka panjang dalam koperasi.

Sasaran Strategis I :

1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis

Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1. Persentase Koperasi Berkualitas.	5,4%	7.34%	135,93
2. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0.03%	(0,64%)	(21,33)

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

➤ **Persentase Koperasi Berkualitas.**

Data perkembangan koperasi di Provinsi Jambi tahun 2022, menunjukkan jumlah koperasi yang ada di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 3.934 unit, terdiri dari 3708 unit binaan kabupaten/kota, 177 unit koperasi binaan provinsi, 49 unit binaan nasional, dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.042 unit, ini menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya 2021 dimana jumlah koperasi aktif sebanyak 2.045 unit, dari data tersebut dapat dilihat persentase penurunan jumlah koperasi aktif sebesar 0,0015 %. Untuk koperasi yang menjadi binaan provinsi jumlah koperasi aktif sebanyak 91,52 % (162 unit). Koperasi Aktif adalah koperasi yang kelembagaannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dan usahanya berjalan dan ada transaksi usaha.

Dari total koperasi aktif sebanyak 2.042 unit, koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun 2022 adalah sebanyak 389 unit, Pada tahun 2021 jumlah koperasi yang melakukan RAT sebanyak 431 unit data ini menunjukkan adanya penurunan

sebanyak 42 unit atau menurun sebesar 9,74 %. Untuk koperasi binaan provinsi yang melaksanakan RAT sebanyak 26 unit (14,68 %).

Terjadinya mutasi pegawai (petugas penilai kesehatan) dikabupaten/kota mengakibatkan penurunan kinerja pelaksanaan penilaian kesehatan itu sendiri. Tidak tercapainya beberapa target pelaksanaan penilaian kesehatan dikabupaten/kota dikarenakan ada beberapa KSP/USP Koperasi yang tidak memenuhi persyaratan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.

Untuk melihat persentase Koperasi Berkualitas dilakukan dari perbandingan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dengan jumlah koperasi yang ada. Penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan pada tahun 2022 dengan hasil sebanyak 146 unit dinyatakan sehat, 13 unit diantaranya adalah koperasi binaan provinsi.

Dari data diatas maka persentase koperasi berkualitas di provinsi Jambi tahun 2022 adalah 3,7 persen sedangkan untuk koperasi berkualitas binaan provinsi sebanyak 7,34 persen. Maka untuk indikator pertama Dinas koperasi,UKM Provinsi Jambi realisasi yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan.

➤ **Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.**

Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa pada tahun buku yang bersangkutan. Untuk melihat pertumbuhan volume usaha koperasi dapat dilihat dari data perkembangan volume usaha koperasi, dimana pada tahun 2021 volume usaha berjumlah Rp. 1.126.451.978.948,- dan pada tahun 2022 volume usaha koperasi menjadi Rp.1.119.192.420.286,- ini menunjukkan adanya penurunan volume usaha dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 0,0064 %. Hal ini disebabkan ketidakstabilan harga komoditi perkebunan (Sawit dan Karet) sehingga KUD-KUD yang bergerak di beberapa perkebunan mengalami penurunan volume usaha koperasi ditambah juga oleh Pandemi Covid-19.

Sasaran Strategis II :**2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi Secara Optimal pada Peningkatan PDRB**

Tabel 3.4
Pencapaian target kinerja

Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%
1. Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha	3,38%	91,61%	2710,35%
2. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM Binaan	0,07%	(9684,4%)	(138.348,57%)
3. Persentase Pertumbuhan Aset UMKM Binaan	29%	(1529,7%)	(5274,83%)
4. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM	0,57%	21,9%	3842,11%

Analisis atas capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

➤ **Persentase Usaha Kecil Menjadi Wirausaha**

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada tahun 2022, persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha tercatat sebanyak 9023 usaha, dimana terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak 1870 usaha atau meningkat sebanyak 482,51 % melebihi target yang telah ditetapkan pada indikator kinerja untuk tahun 2022.

➤ **Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan**

Omset adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh semua pelaku usaha. Untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi tentu harus dilakukan guna mempertahankan kelangsungan usaha diantaranya dengan memperhatikan kualitas produk, melakukan promosi, layanan terbaik serta melakukan strategi pemasaran.

Pertumbuhan Omset UMKM menjadi salah satu dari indikator kinerja dengan target 0,07 %. Untuk Omset UMKM pada tahun 2022 terjadi penurunan dimana pada tahun 2021 berjumlah Rp. 309.081.091.202.058,- menjadi Rp. 39.405.757.934.297,- atau menurun sebanyak 9684,4 %. Terjadinya penurunan yang sangat besar pada tahun 2022 berkenaan dengan data yang kami dapat dari kabupaten yang menurun dratis, yaitu data kabupaten tanjung jabung timur, yang sampai dengan saat ini belum dapat kami konfirmasi terkait permasalahan yang ada.

dengan demikian persentase pertumbuhan Omset UMKM tahun 2022 menurun dan tidak memenuhi target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

➤ **Persentase Pertumbuhan Asset UMKM binaan**

Pertumbuhan yang pesat dan fokus pada inovasi membuat usaha kecil menjadi yang terbaik, sehingga terdapat potensi bagi usaha kecil yang diharapkan akan terus berkembang dimasa depan.

Untuk pertumbuhan Asset UMKM terjadi penurunan, dimana pada tahun 2021 Asset UMKM Rp. 58.032.528.826.122,- menurun menjadi Rp. 3.560.920.952.281,- atau menurun sekitar 1,529,7 % di tahun 2022. Penurunan Asset UMKM ini sama dengan penurunan pada omset yaitu berkenaan dengan data yang kami dapat dari kabupaten yang menurun

dratis, yaitu data kabupaten tanjung jabung timur, yang sampai dengan saat ini belum dapat kami konfirmasi terkait permasalahan yang ada.

Persentase asset UMKM ini menurun dan tidak mencapai target yang ditetapkan dari indikator kinerja.

➤ **Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor UMKM**

UMKM selain diharapkan memiliki kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan juga memiliki kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat ikut menurunkan tingkat pengangguran dan menciptakan stabilitas ekonomi makro nasional.

Adapun Penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan yaitu tahun 2021 berjumlah 289.569 orang menjadi 370.831 orang di tahun 2022 atau meningkat sebesar 21,9 %. Ini menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM melebihi dari target yang ditetapkan pada indikator kinerja.

Sasaran Strategis III :

1. Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik

Tabel 3.5
Rentang Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1. Nilai SAKIP	71 (BB)	-	-
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	86	88,9	103,37

Analisis atas Capaian Indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

➤ **Nilai SAKIP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat penilaian untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu perangkat daerah serta menjadi bahan evaluasi untuk terus mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada tahun 2021 nilai sakip Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebesar 69,73 dengan predikat (B) sedangkan untuk tahun 2022 belum ada. Sehingga untuk indikator ini belum bisa diukur.

➤ **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Kepuasan masyarakat diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga menjadi salah satu tolak ukur untuk mengevaluasi tingkat pelayanan instansi pemerintah. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi pada tahun 2022 mencapai nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 88,9 dimana hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan indikator kinerja sebesar 86.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai Berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2022

Jumlah Anggaran Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi pada APBD Murni 2022 sebesar Rp. 36,167,391.511,- (tiga puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juga tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 36,059,734,604,- (tiga puluh enam miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 107.656.907,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh rupiah). Kemudian pada APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi Rp.

37.059.668.545,- (tiga puluh tujuh miliar lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) Sehingga total dana Belanja operasi menjadi sebesar Rp. 36.963.851.685,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan belanja modal Rp. 95.816.860,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai Rp 8.874.213.244,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.559.638.441,-
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.530.000.000,-

b. Belanja Modal

Dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 95.816.860,-

2. Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2022

Realisasi Anggaran Dana APBD adalah Sebesar Rp. 35.760.678.698,- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 96,49% dengan sisa Dana sebesar Rp. 1.298.989.847,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh). Rincian realisasi sbb:

c. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai Rp 8.545.568.630,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.910.425.110.068,-
- Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.290.000.000,-

d. Belanja Modal

Dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 94.584.200,-

Tabel 3.6
Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dana APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 8.357.973.244	Rp. 8.029.328.630	96,07 %
2	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000	100 %
3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dna ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 72.191.450	Rp. 69.872.340	96,79 %
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 24.700.000	Rp. 22.750.000	92,11 %
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 29.137.090	Rp. 29.137.090	100 %
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 227.857.804	Rp. 227.807.400	99,98 %
7	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 35.400.000	Rp. 35.282.000	99,67 %
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 80.080.559	Rp. 80.056.000	99,67 %
9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 589.502.079	Rp. 589.455.134	99,99 %
10	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 176.793.660	Rp. 175.561.000	99,30 %
11	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 112.304.000	Rp. 112.300.000	99,99 %
12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 257.739.502	Rp. 250.447.417	97,17
13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 2.861.000	Rp. 2.861.000	100 %
14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 328.680.000	Rp. 328.680.000	100 %
15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 516.840.000	Rp. 503.906.126	97,5 %
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 116.404.000	Rp. 115.736.048	99,43 %
17	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 501.117.800	Rp. 498.627.190	99,5 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
18	Fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Rp. 125.000.000	Rp. 120.343.160	96,27 %
19	Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundangan-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Rp. 150.000.000	Ro. 146.660.337	97,77 %
20	Meningkatnya akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat	Rp. 150.000.000	Rp. 136.849.500	91,23%
21	Penilaian permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Rp. 210.000.000	Rp. 202.654.500	96,5 %
22	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Rp. 2.718.155.947	Rp. 2.584.268.126	95,07 %
23	Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	Rp. 229.999.930	Rp. 221.816.414	96,44 %
24	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	Rp. 475.000.000	Rp. 440.413.206	92,72 %
25	Menumbuhkembangkan UMKM yang menjadi usaha yang tanggung dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasa kemiskinan	Rp. 21.166.930.860	Rp. 20.469.884.320	96,71 %
26	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Rp. 349. 999. 620	Rp. 310.981.760	88,85 %

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance and clean government*.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI**

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik.				Predikat AKIP Pemerintah Daerah	66,84 BB	71 BB		71,5 BB		72 BB		72,5 BB		81 BB		81 BB			
	Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik			Predikat AKIP Pemerintah Daerah	66,84 BB	71 BB		71,5 BB		72 BB		72,5 BB		81 BB		81 BB			
		2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
		2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Predikat AKIP Pemerintah Daerah	B Indeks	BB Indeks	16,465,540,000	BB Indeks	17,492,880,000	BB Indeks	16,551,810,000	BB Indeks	19,034,580,000	BB Indeks	21,722,360	BB Indeks			
		2.17.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersediannya Dokumen Perencanaan	100 %	100%	163,457,668	100%	165,000,000	100%	189,750,000	100%	218,212,500		250,944,375				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	55,000,000	2 Dokumen	55,000,000	2 Dokumen	63,250,000	2 Dokumen	62,737,000	2 Dokumen	73,648,125	10 Dokumen					
		2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	108,457,668	2 Laporan	110,000,000	2 Laporan	126,500,000	2 Laporan	135,475,000	2 Laporan	152,296,250	10 Laporan					
		2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	25,000,000	10 Laporan					
		2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 persen	100 persen	8,742,923,996	100 persen	9,530,631,494	100 persen	10,960,226,218	100 persen	12,604,260,151	100 persen	14,495,899,173	100 persen					
		2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan	70 Orang/Bulan	8,742,923,996	80 Orang/Bulan	9,530,631,494	80 Orang/Bulan	10,960,226,218	80 Orang/Bulan	12,604,260,151	80 Orang/Bulan	14,494,899,173	390 Orang/Bulan					
		2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang disiplin dan Mengikuti Pelatihan	10 %	10 %	166,000,000	10 %	166,000,000	10 %	190,900,000	10 %	252,465,250	10 %	252,465,250	10 %					
		2.17.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	-	-	135 Paket	91,000,000	135 Paket	104,650,000	135 Paket	120,347,500	135 Paket	138,399,625	540 Paket					
		2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang	15,000,000	60 Orang	75,000,000	60 Orang	86,250,000	60 Orang	99,187,500	60 Orang	114,065,625	60 Orang					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	848,463,311	100%	848,463,311	100%	975,732,807	100%	1,122,092,728	100%	1,290,406,638	100%			
		2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	32,554,903	15 Paket	50,000,000	20 Paket	57,500,000	25 Paket	66,125,000	25 Paket	76,043,750	25 Paket			
		2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	182,206,646	4 Paket	200,427,311	4 Paket	230,491,407	4 Paket	265,065,118	4 Paket	304,824,886	4 Paket			
		2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400 Pkaet	400 Pkaet	37,760,000	450 Pkaet	41,536,000	500 Pkaet	37,766,400	550 Pkaet	44,931,360	600 Pkaet	53,171,064	2500 Pkaet			
		2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	96,612,425	15 Paket	105,000,000	15 Paket	110,750,000	15 Paket	128,862,500	15 Paket	149,691,875	15 Paket			
		2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1,321,320	2 Paket	1,500,000	2 Paket	1,725,000	2 Paket	1,983,750	2 Paket	2,281,313	2 Paket			
		2.17.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	3 Laporan			
		2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	392,710,300	1 Laporan	450,000,000	1 Laporan	517,500,000	1 Laporan	595,125,000	1 Laporan	684,393,750	5 Laporan			
		2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	500,000,000	100%	4,400,000,000	100%	3,117,500,000	100%	1,195,125,000	100%	1,374,393,750	100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Item	5 Item	92,391,220	5 Item	200,000,000	5 Item	230,000,000	5 Item	264,500,000	5 Item	304,175,000	5 Item	1,091,066,220		
		2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 item	4 item	255,604,108	8 item	250,000,000	4 item	287,500,000	5 item	930,625,000	4 item	1,070,218,750	4 item	2,793,947,858		
		2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	1 Paket	2,500,000,000				-		-	1 paket	2,500,000,000		
		2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	1 paket	500,000,000							1 paket	500,000,000		
		2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 item	1 item	-	1 Paket	100,000,000	1 Paket	1,400,000,000					2 item	1,500,000,000		
		2.17.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						743,200,000		854,680,000		1,232,882,000		1,417,814,300		4,248,576,300		
		2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeliharaan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	743,200,000	100 %	743,200,000	100 %	854,680,000	100 %	1,232,882,000	100 %	1,417,814,300	100 %			
		2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	101,504,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	138,000,000	1 Laporan	158,700,000	1 Laporan	182,505,000	5 Laporan	700,709,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01.1.08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	250,532,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	345,000,000	1 Laporan	646,750,000	1 Laporan	743,762,500	5 Laporan	2,286,044,500		
		2.17.01.1.08,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2,861,000	1 Laporan	3,200,000	1 Laporan	3,680,000	1 Laporan	4,232,000	1 Laporan	4,866,800	5 Laporan	18,839,800		
		2.17.01.1.08,04	Penyediaan Jasa Pelayananan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	278,412,000	1 Laporan	320,000,000	1 Laporan	368,000,000	1 Laporan	423,200,000	1 Laporan	486,680,000	5 Laporan	1,876,292,000		
		2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	1,018,844,000	100 %	2,518,844,000	100 %	1,171,670,600	100 %	1,347,421,190	100 %	1,549,534,369	100 %			
		2.17.01.1.09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	429,930,000	32 Unit	490,000,000	37 Unit	563,500,000	37 Unit	588,025,000	37 Unit	675,228,750	37 Unit	2,806,683,750		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.01 .1.09,0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	60,000,000	2 Unit	70,000,000	2 Unit	130,000,000		
		2.17.01 .1.09,0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di perbaiki	-		-	1 unit	100,000,000	1 unit	100,000,000	-	-	-	-	2unit	200,000,000		
		2.17.01 .1.09,0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70 unit	111,004,000	70 unit	111,004,000	70 unit	127,654,600	70 unit	146,802,790	70 unit	168,823,209	70 Unit	665,288,599		
		2.17.01 .1.09,0 9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	584,487,000	3 Unit	117,840,000	3 Unit	135,516,000	3 Unit	155,843,400	3 Unit	179,219,910	3 Unit	1,172,906,310		
		2.17.01 .1.09,1 0	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	500,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	115,000,000	1 Unit	1,015,000,000		
		2.17.01 .1.09,1 1	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	115,000,000	1 Unit	315,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 1 : Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing				Persentase Koperasi Berkualitas	2,15 %	5,4 %		5,6 %		6 %		6,7 %		6,7 %		6,7 %			
	Sasaran 1: Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas																		
		2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	20 KSP/USP	20 KSP/USP	383,545,680	25 KSP/USP	441,077,532	27 KSP/USP	507,239,162	29 KSP/USP	583,325,036	30 KSP/USP	699.990.000	151 KSP/USP			
		2.17.02.1,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam	20 KSP/USP	20 KSP/USP	383.545.680	25 KSP/USP	441,077,532	27 KSP/USP	457,239,162	29 KSP/USP	458,325,036	30 KSP/USP	574.990.000	151 KSP/USP		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.02.1,01,01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	20 KSP/USP		383.545.680		441,077,532		457,239,162		458,325,036		574.990.000		2,234,808,810		
				Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Pembina dan Pengurus/Pengelola KSP/USP Kab/Kota	-	-		10 Koperasi (33 Orang)		10 Koperasi (33 Orang)		10 Koperasi (33 Orang)		10 Koperasi (33 Orang)		40 Koperasi (132 orang)			
				Sosialisasi sistem pelayanan perizinan usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang melalui OSS secara terintegrasi bagi pembina dan pengurus KSP/USP di wilayah Peovinsi Jambi	-	-		2 kali (50 orang)		2 kali (50 orang)		2 kali (50 orang)		2 kali (50 orang)		8 kali (200 orang)			
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Akuntansi Koperasi	22 Koperasi	22 Koperasi		-		-		-		-					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	<u>22 Koperasi</u>	<u>22 Koperasi</u>		-		-		-		-							
		2.17.02.1,02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/	Jumlah Penyelesaian Perizinan Kantor cabang, Kantor cabang, Kantor Cabang Pembantu pembantu	0 Kantor Kas/Kantor Cabang/Kantor Kas Pembantu	0 Kantor Kas/Kantor Cabang/Kantor Kas Pembantu		0 Kantor Kas/Kantor Cabang/Kantor Kas Pembantu		1 Kantor Kas/Kantor Cabang/Kantor Kas Pembantu	100,000,000	1 Kantor Kas/Kantor Cabang/Kantor Kas Pembantu	100,000,000	1 Kantor Kas/Kantor Cabang/Kantor Kas Pembantu	100,000,000	3 Kantor Kas/Kantor Cabang/Kantor Kas Pembantu		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.02.1,02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	3 Unit	150,000,000		
		2.17.02.1,02.01	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									1	75,000,000	1	75,000,000	1	150,000,000		
		2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkinerja Baik	30 (6 Koperasi) Persen	40 Persen	479,320,000	45 Persen	575,170,000	50 Persen	675,610,000	50 Persen	828,240,000	50 Persen	927,630,000	50 Persen	3,485,980,000		
		2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kepatuhan nya	20 Unit/Usaha	20 Unit/Usaha	202,623,500	21 Unit/Usaha	243,148,200	23 Unit/Usaha	291,777,840	25 Unit/Usaha	335,544,516	25 Unit/Usaha	420,160,059	134 Unit/Usaha		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.03.1.01,02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuk Koperasi yang Kuat,Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 Koperasi	20 Unit Usaha	202,623,500	20 Unit Usaha	289.005.000	20 Unit Usaha	310.805.000	20 Unit Usaha	375.620.000	20 Unit Usaha	410.815.000	120 Unit Usaha	1.270.254.115		
		2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	25 Unit Usaha -	20 Unit Usaha	196,800,000	21 Unit Usaha	236,168,000	23 Unit Usaha	283,392,000	25 Unit Usaha	340,070,400	25 Unit Usaha	408,084,400	25 Unit Usaha		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	25 Koperasi	20 Koperasi	196,800,000	20 Koperasi	286,168,000	20 Koperasi	314.805.000	20 Koperasi	377.620.000	20 Koperasi	416.815.000	125 koperasi	1,464,514,800		
		2,17,04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat dan Cukup Sehat	40 Persen	43 Persen	277,724,800	45 Persen	319,383,500	47 Persen	367,291,025	50 Persen	422,384,679	50 Persen	473,070,000	50 Persen			
		2,17,04,1,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	20 Koperasi	20 Koperasi	277,724,800	21 Koperasi	319,383,500	23 Koperasi	367,291,025	25 Koperasi	422,384,679	25 Koperasi	473,074,679	25 Koperasi	1,859,850,854	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2,17,04,1,01.01	Penilaian Permodalan,kualitas Aktiva, Produktif,Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	21 Unit Usaha	20 Unit Usaha	277,724,800	20 Unit Usaha	319,383,500	20 Unit Usaha	367,291,025	20 Unit Usaha	272,384,679	20 Unit Usaha	298,074,679	121 Unit Usaha	1,834,850,854		
		2,17,04,1,01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	10	150,000,000		175.000.000		325,000,000		
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatkan pelatihan setiap tahun	4 Persen	5 Persen	2,500,000,000	5 Persen	2,875,000,000	5 Persen	3,306,250,000	5 Persen	3,802,187,500	5 Persen	4.258.450.000	25 Persen			
		2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi, UKM Yang Mendapatkan Pelatihan setiap tahun	4 Persen	5 Persen	2,500,000,000	5 Persen	2,875,000,000	5 Persen	3,306,250,000	5 Persen	3,802,187,500	5 Persen	4.258.450.000	25 Persen	16,741,896,092		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah peserta pelatihan Kompetensi Perkoperasian		50 orang		84 orang		84 orang		84 orang		84 orang		84 orang				
			Jumlah peserta pembekalan tenaga pendamping		17 orang		19 orang		19 orang		19 orang		19 orang		19 orang				
		2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM							150 Orang	500,000,000	150 Orang	500,000,000	150 Orang	500,000,000	450 Orang	1,500,000,000		
		2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (119 Koperasi Aktif)	.-1.69%	2,69%	1,356,000,901	3,69%	1.559.400.000	4,69%	1.793.310.000	5,69%	2.062.310.000	6,69%	2.309.780.000	23,45%	9.080.800.000		
		2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1,356,000,901		1.559.400.000		1.793.310.000		2.062.310.000		2.309.780.000		9.080.800.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajuem, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha			449,955,785		623.400.000		566.910.000		774.450.000		836.241.000		2.976.604.884				
				Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali					
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi	kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali					
				Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali					
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	0 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	0 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota	0 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			
		2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			680,396,116		936,000,000		976,400,000		1,037,860,000		1,223,539,000		5,354,195,116		
				Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan	5 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Jumlah Sosialisasi /penyuluhan tentang perkoperasian bagi masyarakat	15 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		25 kali			
				Jumlah bimtek manajemen perkoperasian bagi PPKL	4 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Rakor Sinkronisasi Data KUMKM se Provinsi Jambi	4 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali					
				Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bagi koperasi berkualitas	4 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali					
				Peringatan Hari Koperasi Nasional tk nasional dan Provinsi				1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali					
				Rakor Pemetaan Pertumbuhan Koperasi Baru di wilayah Kab/Kota Seprovinsi Jambi bagi Pembina				1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 kali		4 kali					
				Jumlah dokumen data koperasi dan UMKM	5 Dokumen	1 dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 dokumen		10 Dokumen					
		2.17.06.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						20 Keluarga	250.000.000	20 Keluarga	250.000.000	20 Keluarga	250.000.000	60 Keluarga	750.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tujuan 2 : Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas dan UMKM yang Produktif dan Mampu Berdaya Saing				Predikat AKIP Pemerintah Daerah	66,84 BB	71 BB		71,5 BB		72 BB		72,5 BB		81 BB		81 BB			
	Sasaran 2 : Terwujudnya UMKM yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB			Predikat AKIP Pemerintah Daerah	66,84 BB	71 BB		71,5 BB		72 BB		72,5 BB		81 BB		81 BB			
		2,17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan	Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)	19,6 Persen	41.210.538.140	21,6 Persen	41.391.910.000	23,6 Persen	41.600.700.000	25,6 Persen	41.840.800.000	27,6 Persen	46.861.700.000	27,6 Persen			

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Pelaksanaan Rakor SHAT bagi UMKM		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
				Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Rakor SIKP		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk/Pemasaran berbasis teknologi (e-commerce)	100 UMKM	0		50 UMKM		100 UMKM		100 UMKM		100 UMKM		150 UMKM			
				Jumlah UMKM Penerima Bantuan Modal/ Peralatan		220 UMKM		3000 UMKM		3000 UMKM		3000 UMKM				9220 UMKM			
		2,17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog		100 Unit Usaha	575,000,000	150 Unit Usaha	611.250.000	150 Unit Usaha	720.437.500	150 Unit Usaha	837.500.000	150 Unit Usaha	935.200.000	700 unit usaha	3.679.390.000		
				Jumlah promosi /pameran yang diikuti	20 kali	3 kali		150 umkm3 ksli		3 kali		3 kali		3 kali		35 kali			
				Jumlah UKM yang di fasilitasi mengikuti pameran	2 UKM	4 UKM		4 UKM		4 UKM		4 UKM		4 UKM		20 UKM			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan (2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah fasiliti gelar produk bagi UMKM	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		12 lkali			
				Jumlah UKM yang di promosikan melalui media cetak /elektronik		2 UMKM		2 UMKM		2 UMKM		2 UMKM		2 UMKM		10 UMKM			
				Jumlah aplikasi promosi UKM								1 aplikasi				1 aplikasi			
		2,17.08 .1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				30 orang	50.000.000	30 orang	60.000.000	30 orang	60.000.000	50 orang	70.000.000	140 orang	240.000.000		

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Nama Unit Organisasi : DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

b. Pengoordinasian kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Instansi terkait

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

d. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Data
1. Terwujudnya Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Berkualitas	1. Persentase Koperasi Berkualitas (satuan %)	<div>(Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset / Jumlah seluruh koperasi) X 100</div> <div>Koperasi yang melaksanakan RAT adalah Koperasi yang menilai pertanggung jawaban pengurus, pengawas dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu, menetapkan kebijaksanaan pengurus dalam tahun buku yang akan datang yang telah diatur berdasarkan Permenkop UKM RI No. 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi pasal 4 s/d 20;</div>
2. Terwujudnya UMKM Yang Mampu Berkontribusi secara Optimal pada Peningkatan PDRB	2. Persentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha (satuan %)	<div>(Jumlah Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha / Jumlah Usaha Kecil keseluruhan) X 100</div> <div><div>▪ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau</div></div>

		<p>bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yang dimaksud dengan Usaha Kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)
3. Terwujudnya Aparatur Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang Profesional dan Berkinerja Baik	3. Nilai SAKIP	
	4. Nilai Kepuasan Masyarakat	

Jambi, Januari 2022
Kepala Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jambi




HAMDAN, SH., M.Si
Pembina Uama Muda
NIP. 19630421 198503 1 008

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2020

Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Outcome (Hasil)	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.021.687.016	APBD	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Tertib Administrasi Surat Menyurat Dinas	3.750 lbr	98.241.110		
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	12 Bulan	290.594.568		
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Keamanan dan Kelancaran Dalam Melaksanakan Tugas	12 Bulan	3.367.430		

4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Administrasi Keuangan	24 Orang	269.344.621			
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Kinerja Pelayanan dan Administrasi Rutin Kantor	68 Jenis	174.209.452			
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas aparat Dinas Koperasi, UMKM	13 Jenis	60.526.727			
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kondisi kenyamanan kerja Dinas Koperasi, UMKM	12 Buah 1 Paket	42.000.000			
8.	Penyediaan Kebersihan Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terjaganya Kebersihan Kantor	12 Bulan	135.005.979			
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Dinas Koperasi, UMKM	5 Jenis	7.027.680			
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Lancarnya Pelaksanaan rapat - rapat Dinas	90 Pegawai	36.602.500			

11.	Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi	400 Orang	904.766.949		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	3.995.400.000		
1.	Pembangunan Gedung Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kinerja	1 Paket	51.240.000		
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Bertambahnya Aset/ Barang Inventaris untuk mendukung kelancaran kerja	-	400.000.000		
3.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Kenyamanan, Kelancaran Bekerja dan Pemeliharaan Kantor	12 Jenis	765.804.654		
4.	Pengadaan Mebeleur	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Total	70.000.000		
5.	Pengadaan Komputer	Dinas Koperasi, UKM	Kelancaran Pelaksanaan Tugas	22 Unit	290.331.030		

		Provinsi Jambi					
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja	1 Paket	192.487.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kinerja Aparatur	30 Unit	438.995.744		
7.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja	1 Paket	380.000.000		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatkan Kenyamanan dan Kelancaran Kerja	3 Jenis	256.541.572		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi		1 Paket	150.000.000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya kenyamanan dan kelancaran kerja	1 Paket	1.000.000.000		
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase PNS yang Disiplin	100%	67.348.600		

1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terciptanya Keseragaman dan Kenyamanan Dalam Bekerja	115 Stel	67.348.600		
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	178.400.585		
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur	92 Orang	178.400.585		
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai Sakip	100%	140.000.000		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Jumlah Dokumen Kinerja dan Pelaporan	8 Dokumen	140.000.000		
VI	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan		1. Persentase Penumbuhan UMKM	3%	2.972.800.000		
			2. Persentase Perkembangan UMKM	5%			
1.	Pengembangan UMKM melalui Pemberdayaan Masyarakat di KTM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya keterampilan dan SDM UMKM	90 UMKM	60.600.000		

2.	Penguatan Ekonomi Lokal		<p>1. Meningkatnya Keterampilan dan SDM UMKM.</p> <p>2. Meningkatnya Kesadaran UMKM untuk mengurus izin Usaha</p>	200 UMKM	315.160.000			
3.	Pemberdayaan dan Pengembangan KSP/USP-Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	<p>1. Tumbuh dan berkembangnya KSP/USP Koperasi berwawasan Gender.</p> <p>2. Terakomodirnya Kebutuhan Permodalan bagi KSP/USP Koperasi dalam mengakses Sumber Pembiayaan</p> <p>3. Meningkatnya Keterampilan Pengelola dan Pengawas Internal KSP/USP Koperasi.</p>	<p>66 Orang / 2 kali</p> <p>75 Orang / 1 kali</p> <p>35 Orang / 2 kali</p>	245.600.000			
4.	Sosialisasi Pembiayaan bagi KUMKM dan LKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	<p>Terfasilitasinya Penerbitan Sertikat PMK di Kabupaten / Kota</p>	<p>66 Orang</p> <p>450 Orang</p>	250.000.000			

5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Termonitor dan terevaluasinya Kinerja KUMKM	36 orang 85 Koperasi 45 UMKM	252.548.000			
5.	Sosialisasi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. Meningkatnya Akses Pembiayaan dan Permodalan Bagi Koperasi 2. Meningkatnya Kesadaran Penguatan perlindungan Terhadap Koperasi 3. Meningkatnya Keterampilan dan layanan Usaha 4. Meningkatnya Kualitas Produk dan Perluasan Akses Pasar 5. Meningkatnya Pemahaman Tentang Perundang-undangan	110 Kop 110 Kop 110 Kop 110 Kop	348.892.000			
6.	Peningkatan Daya Saing dan UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. meningkatnya Usaha Koperasi Dalam Rangka Mendukung Usaha	110 Kop				

			Ketanan pangan					
			2. Meningkatnya Usaha Koperasi	110 Kop				
			3. Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	110 Kop				
7	Pelatihan Pengelolaan Koperasi, usaha mikro, dan kecil	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi				1.500.000.000		
VI	Program Peningkatan Daya Saing KUKM		Persentase Produk yang Memenuhi Standard			4.644.356.000		
1.	Pengembangan Produk Unggulan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Berkembangnya Desain serta terciptanya Diversifikasi Produk	150 UMKM		549.780.000		
2.	Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kualitas Produksi dan SDM KUMKM	44 UMKM		588.030.000		
3.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Koperasi		1. Meningkatkan Kinerja Pengawas / Pengurus / Pengelola Koperasi	75 Orang		573.296.000		
			2. Berkembangnya wawasan dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi	75 Orang				

			3. Meningkatnya SDM Pengurus / Pengelola Koperasi dalam menyusun Laporan keuangan	100 Orang				
			4. Meningkatnya Tertib Administrasi Organisasi dan Usaha Koperasi	100 Orang				
4.	Sosialisasi HKI dan Label Halal bagi UMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi HKI dan Produk Halal Kepada UMKM dan Aparat	200 UMKM	467.250.000			
5.	Pengembangan Kemitraan	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Jumlah UMKM yang melaksanakan program kemitraan	150 UMKM	399.000.000			
6.	Bimbingan Teknis KUMKM	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya SDM dan Daya Saing KUMKM	250 UMKM	400.000.000			
7.	Pendampingan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kualitas Produksi dan SDM KUMKM	250 UMKM	400.000.000			
8.	Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan One Village One Product OVOP	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Terciptanya Pemberdayaan UMKM Melalui Pendekatan OVOP	100 Orang	282.000.000			

9.	Penyelenggaraan Promosi Produk KUMKM Tingkat Nasional, Regional dan Luar Negeri	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya jaringan pemasaran produk UMKM dan Pendapatan UMKM	37 UMKM	985.000.000		
VII	Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi		Persentase Koperasi Berkualitas		2.070.000.000		
1.	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	<p>1. Meningkatnya peran dan Pemahaman Perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi</p> <p>2. Meningkatnya Pemahaman Tentang Koperasi bagi Kelp. Usaha Bersama & Kel. Masyarakat</p> <p>3. Meningkatnya Peran Kelembagaan Koperasi bagi Pembina dan Gerakan Koperasi/Instansi Terkait</p>	<p>300 Orang / 1 kali</p> <p>25 Orang / 9 kali</p> <p>30 Orang / 9 kali</p>	693.206.000		

			4. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi Berkualitas	24 Koperasi / 1 kali				
2.	Pemberdayaan dan Penguatan Usaha Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	1. Meningkatnya Peran Pengurus / Pengelola Koperasi dalam meningkatkan kinerjanya.	30 Orang / 8 Kab/Kota	280.902.000			
			2. Meningkatnya Partisipasi Anggota Koperasi.	30 Orang / 4 Kab/Kota				
			3. Meningkatnya dan berkembangnya Manajemen Usaha Koperasi.	33 koperasi & Pembina / 2 Kali				
			4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Pengurus / Pengelola Koperasi.	12 Koperasi / 1 kali				
			5. Menguatnya Kualitas Usaha Koperasi.	70 Koperasi pembina & instansi terkait / 1 kali				
			6. Meningkatnya Usaha Koperasi dalam rangka mendukung Usaha Ketahanan Pangan.					

3.	Bimbingan Teknis KSP/USP-Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Tumbuh dan berkembangnya Koperasi / USP Koperasi di Kabupaten/Kota	99 Orang / 11 Kab-Kota 385 KSP/USP-Kop Se-provinsi Jambi 84 Orang Se-Provinsi Jambi	324.805.680			
4.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkakan Kualitas Kelembagaan dan usaha Koperasi	20 Koperasi Primer/ Sekunder Tingkat Provinsi 33 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota	257.100.000			
5.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	20 Koperasi Primer/ Sekunder Tingkat Provinsi	298.614.320			

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6.	Penerapan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan Koperasi	Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi	Meningkatnya Kesadaran Koperasi Dalam Memenuhi Peraturan Perkoperasian	33 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota 20 Koperasi Primer/ Sekunder Tingkat Provinsi 33 Koperasi Primer Tingkat Kab / Kota	215.372.000		
TOTAL					16.089.992.201		

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

Beserta Proyeksi Maju Tahun 2023

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran program (Outcome)Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Nilai SAKIP		B				
2.17.01.1.01	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				165.000.000			189.750.000
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah		2 Dokumen	55,000,000		2 Dokumen	63.250.000
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	110.000.000		2 Laporan	126.500.000
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.530.631.494			10.960.226.218
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		80 Orang/Bulan	9.530.631.494		80 Orang/Bulan	10.960.226.218
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							190.900.000
2.17.01.1.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		135 paket	91.000.000		135 paket	104.650.000
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		60 Orang	75,000,000		60 Orang	86.250.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				848.463.311			975.732.807
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10 Paket	50.000.000		10 Paket	57.500.000
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	200.427.311		4 Paket	230.491.407

2.17.01.1.06,04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		400 Pkaet	41.536.000		400 Pkaet	37.766.400
2.17.01.1.06,05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		15 Paket	105.000.000		15 Paket	110.750.000
2.17.01.1.06,06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Paket	1.500.000		2 Paket	1.725.000.
2.17.01.1.06,08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-			20.000.000
2.17.01.1.06,09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	450.000.000		1 Laporan	517.500.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-	4.400.000.000		-	1.195.125.000
2.17.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 Unit Mobil	850.000.000		2 Unit Mobil	500.000.000
2.17.01.1.07,02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-		-	700.000.000
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Item	200.000.000		5 Item	250.000.000
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			4 item	250.000.000		4 item	287.500.000
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 paket	2.500.000.000			
2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Paket	500.000.000			
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 paket	100.000.000		1 paket	1.400.000.000
2.17.01.1.07.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				743.200.000			854.680.000
2.17.01.1.08,01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	120.000.000		1 Laporan	138.000.000
2.17.01.1.08,02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya		1 Laporan	300.000.000		1 Laporan	345.000.000

		Air dan Listrik yang Disediakan						
2.17.01.1.08,03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	3.200.000		1 Laporan	3.680.000
2.17.01.1.08,04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	320.000.000		1 Laporan	368.000.000
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.018.844.000			1.171.670.600
2.17.01.1.09,01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30 Unit	490.000.000		30 Unit	563.500.000
2.17.01.1.09,02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	-		-	-
2.17.01.1.09,05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di perbaiki		1 unit	100.000.000		1 unit	100.000.000
2.17.01.1.09,06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		70 unit	111,004,000		70 unit	127.645.600
2.17.01.1.09,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	117.840.000		3 Unit	135.516.000
2.17.01.1.09,10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	200,000,000		1 Unit	100,000,000
2.17.01.1.09,11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-		-	100.000.000
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah penyelesaian perizinan usaha simpan pinjam		25 KSP/USP	441.077.532		27 KSP/USP	507.239.162
2.17.02.1,01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				441.077.532			507.239.162
2.17.02.1,01,01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas			441.077.532			457.239.162

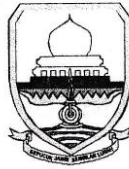
	Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam						
		Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Pembina dan Pengurus/Pengelola KSP/USP Kab /Kota		-			-	
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Akuntansi Koperasi		<u>22 Koperasi</u>			<u>22 Koperasi</u>	
		Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimtek tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi		<u>22 Koperasi</u>			<u>22 Koperasi</u>	
2.17.02.1.02,01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam						50.000.000
2.17.02.1.02,01	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Koperasi Berkinerja Baik		45%	575.170.000		45%	675.610.000
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat		-	-		-	50.000.000
2.17.03.1.01,02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuk Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel		20 Unit Usaha	289.005.000		20 Unit Usaha	310.805.000
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi			286.168.000			314.805.000

	(Satu) Daerah Provinsi			-	-		-	-
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi		20 Koperasi	286.168.000		20 Koperasi	314.805.000
2,17,04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi sehat dan Cukup Sehat			0.43 (47%)		0.43 (47%)	367.291.025
2,17,04,1,01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							367.291.025
2,17,04,1,01.01	Penilaian Permodalan,kualitas Aktiva, Produktif,Manajemen Efisiensi Likuiditas, Jadidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi			20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	367.291.025
2,17,04,1,01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan			-		-	-
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang mendapatka n pelatihan setiap tahun			2.875.000.000		0.05	3.306.250.000
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2.875.000.000			3.306.250.000
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			500 Orang (5%)		500 Orang (5%)	3.306.250.000
	Jumlah peserta pelatihan keterampilan teknis				150 orang		150 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Perkoperasian				150 orang		150 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Kewirausahaan				150 orang		150 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Manajerial				150 orang		150 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Teknologi Informasi				100 orang		100 orang	
	Jumlah peserta pelatihan Kompetensi Perkoperasian				84 orang		84 orang	
	Jumlah peserta pembekalan tenaga pendamping				19 orang		19 orang	
2.17.05.1.02	Pendidikan dan Latihan UKM yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM							
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (119 Koperasi Aktif)			2,69%	1.539.400.000	3,6%	1.793.310.000

2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1.539.400.000		
.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi					1.539.400.000		
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajumen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha				623.400.000		566.910.000
		Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Rakor Evaluasi Perkembangan Program LPDB			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Koperasi			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan FGD Perlindungan dan penguatan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pemasaran usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pendampingan usaha koperasi lintas daerah kabupaten kota			1 kali			
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen, Standarisasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan			936.000.000			976.400.000

	dan Restrukturisasi Usaha	Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelembagaan		1 kali			1 kali	
		Jumlah Sosialisasi /penyuluhan tentang perkoperasian bagi masyarakat		5 kali			5 kali	
		Jumlah bimtek manajemen perkoperasian bagi PPKL		1 kali			1 kali	
		Jumlah Rakor Sinkronisasi Data KUMKM se Provinsi Jambi		1 kali			1 kali	
		Jumlah kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi bagi koperasi berkualitas		1 kali			1 kali	
		Peringatan Hari Koperasi Nasional tk nasional dan Provinsi						
		Rakor Pemetaan Pertumbuhan Koperasi Baru di wilayah Kab/Kota Se provinsi Jambi bagi Pembina						
		Jumlah dokumen data koperasi dan UMKM		1 dokumen			1 dokumen	
2,17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Binaan (72,126 UMKM)		19,6%	41.391.910.000		19,6%	41.600.700.000
2,17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kKKeperluan				41.391.910.000			41.391.910.000
2,17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			40.000.000			40.000.000
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Sertifikasi Produk Halal		100 orang			100 orang	
		Jumlah pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas Produk Unggulan /Andalan Provinsi Jambi		100 orang			100 orang	
		Jumlah pelaksanaan Kegiatan Desiminasi Perizinan BPOM		1 kali			1 kali	
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan HKI Bagi UMKM		1 kali			1 kali	
		Jumlah Pelaksanaan Rakor SHAT bagi UMKM		1 kali			1 kali	
		Jumlah Pelaksanaan Pelaksanaan Rakor SIKP		1 kali			1 kali	
		Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk/Pemasaran berbasis teknologi (e-commerce)		1 kali			1 kali	

		Jumlah UMKM Penerima Bantuan Modal/ Peralatan		1500			1500	
2.17.06.1.01.03	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						
2,17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		300 orang	1.391.910.000		300 orang	1.600.700.000
2,17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan		0.07	661.250.000		0.08	780.437.500
2,17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				661.250.000			780.437.500
2,17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog		100 Unit Usaha	661.250.000		100 Unit Usaha	780.437.500
		Jumlah promosi /pameran yang diikuti		3 kali			3 kali	
		Jumlah UKM yang di fasilitasi mengikuti pameran		4 UKM			4 UKM	
		Jumlah fasiliti gelar produk bagi UMKM		2 kali			2 kali	
		Jumlah UKM yang di promosikan melalui media cetak /elektronik		2 UMKM			2 UMKM	
		Jumlah aplikasi promosi UKM						
2,17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum						



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAMDAN,SH. M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H. FACHRORI UMAR,M.Hum

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2020

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAMBI

DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
DINAS KOPERASI
USAHA KECIL
DAN MENENGAH

HAMDAN,SH. M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19630421 198503 1 008

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI
Tahun : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1. Persentase Koperasi Berkualitas 2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	15% 0,37%
II	1. Meningkatnya Produktivitas UMKM 2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan 2. Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan 1. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja sektor UMKM	0,14% 0,20% 0,57%
III	1. Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM	1. Persentase Peserta Diklat yang Lulus dengan Predikat Baik	80%

Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Pprasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
7. Peningkatan Daya Saing KUMKM
8. Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi

TOTAL

Anggaran

Rp.	1.769.634.250
Rp.	1.155.560.800
Rp.	71.500.000
Rp.	85.000.000
Rp.	80.067.950
Rp.	3.265.000.000
Rp.	1.025.000.000
Rp.	1.567.000.000
	9.018.763.000

GUBERNUR JAMBI

DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Jambi, Januari 2020

KEPALA DINAS

HAMDAN, SH, M.Si

Pembina TK I

NIP.19630421 198503 1 008

RENCANA KERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS KOPERASI, UKM PROVNSI JAMBI
Tahun : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	1. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1. Persentase Koperasi Berkualitas 2. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	15% 0,37%
II	1. Meningkatnya Produktivitas UMKM 2. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1. Persentase Pertumbuhan Omset UMKM binaan 2. Persentase Pertumbuhan Aset UMKM binaan 1. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja sektor UMKM	0,14% 0,20% 0,57%
III	1. Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM	1. Persentase Peserta Diklat yang Lulus dengan Predikat Baik	80%

GUBERNUR JAMBI

DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Jambi, Januari 2020
KEPALA DINAS

HAMDAN, SH, M.Si

Pembina TK I

NIP. 19630421 198503 1 008



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

JlnJenderal A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi
Telepon(0741) 61740-60804 Fax. (0741) 61740 Kode Pos - 36122

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HAMDAN,SH,M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H. AL HARIS, S.Sos., MH

Jabatan : Gubernur Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

DR. H. AL HARIS, S.Sos.,MH

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua

DTO

DR. H. AL HARIS, S.Sos.,MH

Pihak Pertama

HAMDAN,SH,M.,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630421 198503 1 008

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI JAMBI

TAHUN : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	1. Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi berkualitas	1. Persentase koperasi berkualitas	2,00 %
		2. Pertumbuhan volume usaha koperasi	2,69 %
II	1. Terwujudnya UMKM yang mampu berkontribusi secara optimal pada peningkatan PDRB	1. Persentasi usaha kecil menjadi wirausaha	3,29 %
		2. Persentase pertumbuhan omset UMKM binaan	6,82 %
		3. Persentase pertumbuhan aset UMKM binaan	29 %
		4. Persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM	0,57 %
III	1. Terwujudnya aparatur dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi yang profesional dan berkinerja baik	1. Indeks kepuasan masyarakat	86 %
		2. Nilai SAKIP	71 %

Jambi, Januari 2022

GUBERNUR JAMBI

DTO

DR. H. AL HARIS, S. Sos., MH

KEPALA DINAS



HAMDAN, SH., M. Si

Pembina Utama Muda

NIP.19630421 198503 1 008

